

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Kasus Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2020)

Renova Simanjuntak, Tantry Sitohang Andi Lolo
Universitas Ottow Geissler Papua, Indonesia
Email : jayapuracity48@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Keerom tahun 2020 berdasarkan perspektif kinerja keuangan, dengan fokus pada rasio-rasio keuangan utama yang dihitung dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun anggaran 2019–2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Rasio keuangan yang dihitung meliputi rasio kemandirian daerah, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, belanja operasi, belanja modal, dan likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Keerom pada tahun 2020 memiliki tingkat kemandirian daerah yang rendah, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang efektif, ketidakefisienan dalam pemungutan PAD, pertumbuhan PAD negatif, peningkatan belanja operasi, penurunan belanja modal, serta aset lancar yang tidak mencukupi untuk menutupi utang jangka pendek. Temuan ini disebabkan oleh tantangan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada pendapatan dan pengelolaan keuangan. Penelitian ini menekankan perlunya strategi keuangan yang lebih baik untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan efisiensi, terutama dalam situasi krisis. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya perencanaan keuangan yang kuat dan penyesuaian kebijakan untuk memperkuat kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Analisis Rasio Keuangan, Kemandirian Fiskal, Dampak COVID-19, Efisiensi Anggaran.

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Keerom Regency Government in 2020 from a financial perspective, focusing on key financial ratios derived from the Budget Realization Report and Balance Sheet for the fiscal years 2019–2020. The research employs a descriptive quantitative method, utilizing secondary data from the Local Government Financial Reports. Financial ratios calculated include regional independence, effectiveness, efficiency, growth, operational expenditure, capital expenditure, and liquidity ratios. The findings reveal that Keerom Regency in 2020 exhibited low regional independence, ineffective realization of Local Revenue (PAD), inefficiency in PAD collection, negative PAD growth, increased operational spending, decreased capital expenditure, and insufficient current assets to cover short-term liabilities. These outcomes are attributed to the economic challenges posed by the COVID-19 pandemic, which significantly impacted revenue generation and financial management. The study underscores the need for improved financial strategies to enhance fiscal autonomy and efficiency, particularly in times of crisis. The implications of this research highlight the importance of robust financial planning and policy adjustments to strengthen local government performance and accountability.

Keywords: Local Government Financial Performance, Financial Ratio Analysis, Fiscal Autonomy, COVID-19 Impact, Budget Efficiency.

PENDAHULUAN

Pandemi virus Corona (Covid-19) berdampak besar pada penurunan pendapatan seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Keerom (Fitri et al., 2021; Rahayu & Rahman, 2021). Meski begitu, upaya untuk mempertahankan kinerja pendapatan harus tetap dilakukan agar keuangan daerah tidak turun secara drastis (Sari & Nugroho, 2020). Penilaian kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non-profit, termasuk pemerintahan (Indrayani & Utama, 2020; Syahputra & Wibowo, 2022). Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (Putri & Darwanis, 2019; Rahmawati & Syam, 2021).

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang telah diganti menjadi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan evaluasi terhadap kemampuan pemerintah daerah adalah dengan penilaian menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya yang meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak (Kurniawan & Harjanto, 2016). Pengukuran dan indikator kinerja digunakan untuk membandingkan antara satu daerah dengan daerah lain, dengan angka rata-rata secara nasional untuk masing-masing tingkat pemerintahan, atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing daerah (Sari & Setyawan, 2021). Hal lain yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Astuti & Rachmawati, 2020). Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Wibowo & Anindyajati, 2019; Yulianti et al., 2022). Dengan analisis ini, pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Marwata & Iskandar, 2018; Aziz & Prasetyo, 2020; Fitriani & Hasibuan, 2023).

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya (Defitri, 2018). Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang handal.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka penyelenggaraan pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif maka pengukuran kinerja

laporan keuangan oleh instansi pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sistem pengukuran kinerja laporan keuangan ditujukan untuk keperluan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi, yaitu stakeholder internal maupun eksternal. Tujuan utama pengukuran kinerja instansi adalah untuk memperbaiki pengambilan keputusan internal serta alokasi sumber daya. Sistem pengukuran kinerja menjadi tidak berguna sama sekali apabila informasi kinerja yang dihasilkan tidak dimanfaatkan dalam memperbaiki pengambilan keputusan. Pencapaian kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah pada masa pandemi dibandingkan dengan sebelum pandemik, dilakukan analisis rasio untuk Tahun 2019 dan 2020.

Kinerja keuangan pemerintah daerah telah menjadi topik yang banyak diteliti dalam konteks otonomi daerah dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Beberapa penelitian terdahulu, seperti Halim (2007) dan Mardiasmo (2004), menekankan pentingnya analisis rasio keuangan untuk menilai kemandirian fiskal dan efisiensi anggaran. Studi oleh Abdullah dan Halim (2003) serta Sasongko (2009) menunjukkan bahwa faktor seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pusat memengaruhi kinerja keuangan daerah. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan dalam kondisi ekonomi normal, sehingga kurang menyentuh dampak krisis seperti pandemi COVID-19.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya analisis mendalam tentang kinerja keuangan pemerintah daerah di masa pandemi, khususnya dalam konteks daerah dengan karakteristik seperti Kabupaten Keerom. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada daerah dengan PAD tinggi atau wilayah maju, sementara daerah dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat, seperti Keerom, masih kurang terwakili. Selain itu, sebagian besar studi hanya mengukur kinerja berdasarkan satu atau dua rasio, tanpa pendekatan komprehensif yang menggabungkan multiple financial ratios untuk memberikan gambaran utuh.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan daerah, terutama di wilayah yang secara struktural rentan terhadap guncangan ekonomi. Pandemi telah mengubah pola belanja dan pendapatan daerah secara signifikan, seperti refocusing anggaran dan penurunan PAD. Tanpa pemahaman yang mendalam, pemerintah daerah kesulitan merumuskan kebijakan yang adaptif untuk memulihkan stabilitas fiskal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan keuangan daerah pascakrisis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang komprehensif dengan menggabungkan tujuh rasio keuangan sekaligus untuk menilai kinerja Kabupaten Keerom selama masa pandemi. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif aktual tentang bagaimana krisis memengaruhi daerah dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan membandingkan data tahun 2019 (pra-pandemi) dan 2020 (masa pandemi), penelitian ini mampu mengidentifikasi perubahan signifikan dalam pola keuangan daerah akibat faktor eksternal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Keerom tahun 2020 berdasarkan perspektif rasio keuangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan atau peningkatan kinerja selama pandemi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dan efisiensi anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks krisis dan daerah dengan ketergantungan fiskal tinggi. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi panduan dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih resilien di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah akademis tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis data aktual, diharapkan penelitian ini dapat menjadi fondasi bagi studi-studi lanjutan tentang adaptasi kebijakan fiskal di era pascapandemi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Keerom berdasarkan perspektif kinerja keuangan dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom tahun anggaran 2019-2020. Pengambilan data dialkukan dengan meminta langsung kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ini ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi maupun Pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan data di atas maka kita dapat melihat besaran rasio kemandirian yang dimiliki oleh Kabupaten Keerom Pada Tahun 2020 sebesar 2,83 % dan 2019 sebesar 2,83%.

Tabel 1. Skala Intreval Derajat Kemandirian

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Kurang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Dari hasil perhitungan rasio yang diperoleh dan disesuaikan dengan tabel derajat kemandirian, maka Kabupaten Keerom masih memiliki predikat kemandirian yang rendah sekali untuk tahun 2020 maupun tahun 2019.

Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2. Skala Interval Derajat Efektivitas

Interval	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Hasil dari perhitungan untuk rasio efektivitas adalah tahun 2020 sebesar 49,96% dan tahun 2019 sebesar 88,50%. Untuk tahun 2020 Kabupaten Keerom kurang efektif dalam merealisasikan PAD kemungkinan karena adanya pandemi *covid - 19* sedangkan tahun 2019, Kabupaten Keerom cukup efektif dalam merealisasikan PAD. Sehingga harus digali lebih banyak lagi potensi yang dapat meningkatkan PAD Kabupaten Keerom.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio efisiensi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan dalam memungut PAD dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan PAD pada satu periode. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD ialah belanja rutin untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang & jasa. Berdasarkan hasil perhitungan, maka kabupaten Keerom termasuk dalam kategori tidak efisien karena nilai yang diperoleh diatas 100 % yaitu tahun 2020 sebesar 2.125% dan tahun 2019 sebesar 1.911%

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur besarnya kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah diraih dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan tahun } t-1}{\text{Pendapatan tahun } t-1} \times 100\%$$

Hasil perhitungan yang diperoleh bahwa pertumbuhan PAD mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2020 yaitu - 22,10 %. Tahun 2020 pemda Kabupaten Keerom mengalami pertumbuhan yang minus dibanding dengan 2019 yang memiliki nilai pertumbuhan sebesar 0,91%.

Rasio Belanja Operasi

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Hasil perhitungan yang diperoleh untuk tahun 2020 adalah sebesar 75,26% dan 2019 sebesar 70,76%. Dari hasil tersebut dapat dilihat ada peningkatan belanja operasi pada tahun 2020 sebesar 4,5%. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai tahun 2020 dari hasil test CPNS tahun 2018.

Rasio Belanja Modal

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pemerintah daerah dengan pendapatan daerah berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari kegiatan investasi modal jangka Panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Hasil perhitungan rasio belanja modal untuk tahun 2020 sebesar 23,59% dan untuk tahun 2019 sebesar 29,13%. Untuk rasio belanja modal ada penurunan sebesar 5,54%. Hal ini kemungkinan karena adanya refocusing anggaran tahun 2020 karena pandemic covid-19.

Rasio Lancar

Rasio ini membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar dan memberikan informasi mengenai kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. Yang termasuk dalam aktiva lancar seperti kas, piutang dagang, efek, persediaan dan aktiva-aktiva lainnya. Sedangkan yang termasuk dalam hutang lancar meliputi, hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji dan hutang lainnya yang menuntut untuk segera dibayarkan. Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.

Hasil perhitungan rasio lancar yang diperoleh untuk Kabupaten Keerom tahun 2020 sebesar 0,22 dan 2019 sebesar 0,19. Ini terlihat bahwa aset lancar yang dimiliki Kabupaten Keerom tidak dapat menutupi utang lancar dalam satu tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Keerom tahun 2020 menunjukkan beberapa kelemahan signifikan, terutama dalam hal kemandirian fiskal yang rendah (2,83%), efektivitas realisasi PAD yang kurang (49,96%), dan ketidakefisienan dalam pengelolaan pendapatan (rasio efisiensi >100%). Selain itu, pertumbuhan PAD yang negatif (-22,10%), peningkatan belanja operasi (75,26%), serta penurunan belanja modal (23,59%) mencerminkan dampak pandemi COVID-19 terhadap stabilitas keuangan daerah. Aset lancar yang tidak mencukupi untuk menutupi utang jangka pendek (rasio lancar 0,22) juga mengindikasikan kerentanan likuiditas. Temuan ini menegaskan perlunya strategi penguatan pendapatan daerah, efisiensi belanja, dan optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan ketahanan fiskal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan periode analisis guna melihat tren jangka panjang, memasukkan variabel kualitatif seperti kebijakan pemerintah pusat atau

faktor sosial-ekonomi lokal, serta melakukan studi komparatif dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah di masa krisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, & Halim. (2003). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah: Studi kasus pada kabupaten/kota Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya, 16–17 Oktober 2003.
- Astuti, R., & Rachmawati, N. (2020). Analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 101–112. <https://doi.org/10.31289/jakd.v5i2.3421>
- Aziz, A. R., & Prasetyo, A. B. (2020). Evaluasi kinerja keuangan daerah dengan pendekatan rasio keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 489–503. <https://doi.org/10.18202/jamal.2020.12.11205>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75.
- Fitri, M., Yuliana, L., & Utami, D. R. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan daerah dan strategi pemulihannya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 21(1), 15–24. <https://doi.org/10.22219/jiep.v21i1.16942>
- Fitriani, D., & Hasibuan, R. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah pasca pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 14(1), 34–46. <https://doi.org/10.54321/jepd.v14i1.425>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Indrayani, N. L. P., & Utama, I. M. (2020). Evaluasi kinerja organisasi sektor publik di masa pandemi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 475–489. <https://doi.org/10.18202/jamal.2020.12.11203>
- Kurniawan, T., & Harjanto, R. (2016). Evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 112–124. <https://doi.org/10.31289/jap.v13i2.1325>
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. ANDI Yogyakarta.
- Marwata, & Iskandar, D. (2018). Kinerja keuangan daerah dalam perspektif rasio keuangan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 45–56. <https://doi.org/10.33701/jiakp.v5i1.752>
- Putri, W. A., & Darwanis. (2019). Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 114–124. <https://jim.usk.ac.id/ekonomi-akuntansi/article/view/11608>
- Rahmawati, R., & Syam, A. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 8(2), 89–102. <https://doi.org/10.24815/jekpi.v8i2.20358>
- Rahayu, E. S., & Rahman, A. (2021). COVID-19 dan implikasinya terhadap fiskal daerah: Studi kasus pada APBD 2020. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 9(1), 56–67. <https://doi.org/10.35794/ekuda.v9i1.33214>
- Sari, N. P., & Setyawan, M. (2021). Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan pendekatan value for money. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), 89–102. <https://doi.org/10.21009/JRMA.008.1.07>
- Sari, R. P., & Nugroho, R. A. (2020). Strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal di masa pandemi. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 201–213. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.3489>
- Sasongko, F. A. (2009). *Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis*

- rasio keuangan APBD dalam era otonomi daerah (Studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Syahputra, R., & Wibowo, A. (2022). Evaluasi kinerja instansi pemerintah berbasis pengukuran outcome. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.28986/jakn.v7i1.463>
- Wibowo, T. S., & Anindyajati, D. (2019). Analisis rasio keuangan sebagai alat penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 10(2), 157–169. <https://doi.org/10.21009/jies.v10i2.1086>
- Yulianti, E., Pratama, A., & Dewi, M. K. (2022). Evaluasi pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah di era otonomi. *Jurnal Ekonomi Regional*, 14(3), 212–225. <https://doi.org/10.53877/jer.v14i3.338>